

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA KELOLA
PT BPR TAHUNAN GANDA
TAHUN 2024**



**Jl. Raya Natar No.195A,Natar - Lampung Selatan
TELEPON: (0721) 91403**



1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

Informasi Umum BPR	
Nama BPR/BPRS	Tahunan Ganda
Alamat	Jalan Raya Natar no.195A lampung Selatan
Nomor Telepon	(0721) 91403

Penjelasan Umum:

Bank merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi Bank tersebut di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa Bank dalam menjalankan kegiatan usahanya bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat untuk bersedia menyimpan dana pada Bank tersebut. Pada dewasa ini kompleksitas kegiatan usaha Bank semakin meningkat seiring perkembangan teknologi informasi dan perkembangan jenis produk dan jasa. Peningkatan kompleksitas kegiatan usaha Bank memberikan dampak yang sangat besar terhadap eksposur risiko yang akan dihadapi oleh Bank, sehingga untuk itu diperlukan kompetensi semua organ organisasi yang ada pada Bank dalam melakukan upaya untuk memitigasi risiko kegiatan usaha Bank. Suatu Bank yang tidak dikelola dengan baik, sudah pasti akan memicu munculnya satu atau lebih risiko dari antara 8 (delapan) risiko yang dihadapi Bank dan akan mengakibatkan kerugian pada Bank serta kepada pihak-pihak yang berkepentingan pada Bank (stakeholders).

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip Good Corporate Governance (GCG) sebagaimana yang disebut di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Tata Kelola (Governance) Bagi Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana tertuang pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 dan di jelaskan kembali dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Keloala Bagi Bank perkreditan Rakyat, mewajibkan semua Bank Prekreditan Rakyat melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan Bank, mulai dari Dewan Komisaris, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana. Adapun yang dimaksud dengan Tata Kelola atau Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness). Penerapan GCG secara konsisten pada kondisi persaingan yang ketat diharapkan memperkuat daya saing perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efisien dan efektif, yang pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan Pemegang Saham dan Stakeholders sehingga Bank Tahunan Ganda dapat beroperasi dan tumbuh secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Pelaksanaan GCG pada Bank Tahunan Ganda senantiasa berlandaskan pada lima prinsip di atas telah disesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pedoman GCG ini merupakan acuan internal dalam pelaksanaan GCG agar seluruh



tingkatan atau jenjang organisasi yang ada pada Bank, dalam mengelola Bank dan menjalankan usahanya senantiasa terarah dan terkontrol, dapat meningkatkan kinerja, mampu melindungi kepentingan stakeholders dan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, secara terus menerus dan berkesinambungan.

Secara singkat kami uraikan prinsip-prinsip dalam pelaksanaan GCG Bank PT. BPR Tahunan Ganda yakni sebagai berikut :

1. Keterbukaan (Transparency) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank menyampaikan dan melaporkan Laporan Penerapan Tata Kelola kepada Otoritas Jasa Keuangan, asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan, serta Laporan keuangan kepada stakeholders secara tepat waktu.
2. Akuntabilitas (Accountability) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki Job descriptions untuk semua jajaran berdasarkan ukuran tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Dalam hubungan ini Bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya check and balance dalam pengelolaan Bank.
3. Tanggung Jawab (Responsibility) yaitu kesesuaian pengelolaan Bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan Bank yang sehat. Sebagai wujud pertanggungjawaban Bank untuk menjaga kelangsungan usahanya, Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (prudential banking practices) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Independensi (Independency) yaitu pengelolaan Bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (conflict of interest), dan setiap keputusan berdasarkan objektivitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.
5. Kewajaran (Fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (equal treatment) serta memberikan/ menyampaikan pendapat bagi kepentingan Bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Sesuai Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan NOMOR 5 / SEOJK.03/2016 Perihal: Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, Menyebutkan bahwa pelaksanaan GCG merupakan salah satu faktor dalam melakukan penilaian sendiri (Self Assessment). Oleh karena itu dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar GCG, Bank Tahunan Ganda yang memiliki modal inti < 50 Milyard harus melakukan penilaian sendiri (Self Assessment) secara berkala yang paling kurang meliputi 9 (sembilan) Faktor Penilaian Pelaksanaan GCG yaitu:

6. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
7. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
8. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
9. Penanganan benturan kepentingan;
10. Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
11. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
12. Batas maksimum pemberian kredit;
13. Rencana bisnis BPR;



14. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Bank Tahunan Ganda telah melakukan penilaian sendiri terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2024 dengan meliputi 9 (sembilan) faktor di atas. Laporan yang kami sajikan ini adalah Laporan Pelaksanaan GCG Tahun 2024 PT. BPR Tahunan Ganda dan disusun berdasarkan hasil penilaian sendiri (self assessment) terhadap Pelaksanaan GCG posisi 31 Desember 2024

Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola

Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola

3. Cukup Baik

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola:

Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

1. Nama

Herikson Laju Siahaan, S.E

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku
- b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank
- c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya.
- d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya.
- e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.
- f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

Mengawasi kinerja Direktur Utama dan Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Dewan komisaris berwenang dalam pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi BPR tahunan ganda

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

1. Nama

Damri Siagian, S.E



Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank
- c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu strategis dan proses pekerjaan
- d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.
- e. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris.

2.

Nama

Heri Yusmadi P Simanjuntak, S.E

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

- a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi
- b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank
- c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu-isu strategis dan proses pekerjaan
- d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audit dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.
- e. Mengkoordinir pembagian tugas Dewan Komisaris.

Rekomendasi Kepada Direksi:

- a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat.
- c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, Memberikan coaching, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/peraturan yang berlaku dan memberikan reward / apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Go Digital.
- d. Memonitor secara ketat debitur yang terdampak dampak COVID-19 agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasi secara cepat.
- e. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti dan sudah tuntas pada paling lambat bulan Desember 2024
- f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan control agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan.
- g. Melakukan inovasi untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk proses kerja maupun akuisisi bisnis.

Dewan Komisaris selalu memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi agar selalu berada pada tracknya untuk selalu memajukan BPR lewat kebijakan-kebijakan yang strategis dan bisa diterapkan dengan mudah oleh para karyawannya



4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

BPR Tidak memiliki komite kredit sehingga Tidak adanya Tindak lanjut rekomendasi tugas dan tanggung jawab komite.

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

BPR tahunan ganda Belum memiliki rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Herikson Laju Siahaan, S.E
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Damri Siagian, S.E
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Heri Yusmadi P Simanjuntak, S.E
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

1.	Nama	Herikson Laju Siahaan, S.E
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR



	Nama	Damri Siagian, S.E
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00
2.	Nama	Heri Yusmadi P Simanjuntak, S.E
	Nama Kelompok Usaha BPR	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya	0,00

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Herikson Laju Siahaan, S.E
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

1.	Nama	Damri Siagian, S.E
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00
2.	Nama	Heri Yusmadi P Simanjuntak, S.E
	Nama Bank/Perusahaan Lain	Tidak Ada Kepemilikan Saham
	Persentase Kepemilikan (%)	0,00

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Herikson Laju Siahaan, S.E
	Hubungan Keuangan Dengan	Tidak ada



Anggota Direksi Lain di BPR	
Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Damri Siagian, S.E
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Heri Yusmadi P Simanjuntak, S.E
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Anggota Direksi BPR tidak memiliki hubungan keuangan terhadap Direksi lain
Anggota Dewan komisaris Pada BPR tidak memiliki hubungan keuangan pada anggota Komisaris lain.

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

1.	Nama	Herikson Laju Siahaan, S.E
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota	Tidak ada



	Direksi Lain di BPR	
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

1.	Nama	Damri Siagian, S.E
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada
2.	Nama	Heri Yusmadi P Simanjuntak, S.E
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR	Tidak ada
	Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR	Tidak ada

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

Anggota Direksi pada BPR tidak memiliki hubungan keluarga terhadap anggota Direksi lain. Anggota Dewan Komisaris Pada BPR tidak memiliki hubungan keluarga terhadap Anggota dewan Komisaris Lain.

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Gaji	1 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp)	Rp13.400.000
Jumlah Komisaris Penerima Gaji	2 orang



Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp)	Rp17.000.000
--	---------------------

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tunjangan	0 orang
-----------------------------------	----------------

Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp)	Rp0
---	------------

Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan	0 orang
-------------------------------------	----------------

Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp)	Rp0
---	------------

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Tantiem	1 orang
---------------------------------	----------------

Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp)	Rp70.417.357
---	---------------------

Jumlah Komisaris Penerima Tantiem	0 orang
-----------------------------------	----------------

Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp)	Rp0
---	------------

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
---	----------------

Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp)	Rp0
---	------------

Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham	0 orang
---	----------------

Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp)	Rp0
---	------------



1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya	0 orang
Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp)	Rp0

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp)	Rp0

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
--	---------



Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp)	Rp0

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Direksi (Rp)	Rp0
Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang)	0 orang
Jumlah Nominal Fasilitas Lain-Lainnya Komisaris (Rp)	Rp0

Direksi mendapat kan gaji dan tunjangan perumahan serta THR sedangkan komisaris hanya mendapatkan gaji

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah

Rasio (a/b)	2,87 : 1
-------------	----------

2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah

Rasio (a/b)	1,00 : 1
-------------	----------

3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah

Rasio (a/b)	1,13 : 1
-------------	----------

4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi

Rasio (a/b)	1,49 : 1
-------------	----------



5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi

Rasio (a/b)	1,52 : 1
-------------	----------

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

1.	Tanggal Rapat	15 Januari 2024
----	---------------	-----------------

	Jumlah Peserta	2 orang
--	----------------	---------

Topik/Materi Pembahasan:

- a. Perkembangan Usaha dan dana pihak ketiga Triwulan ke I Tahun 2024
- b. Dana Pihak ketiga (Tabungan Dan deposito)
- c. Perkembangan Aset Tahun 2024
- d. Perkembangan Laba Rugi 2024
- e. Tingkat Kesehatan Bank Desember 2023

2.	Tanggal Rapat	10 Juli 2024
----	---------------	--------------

	Jumlah Peserta	2 orang
--	----------------	---------

Topik/Materi Pembahasan:

- a. Perkembangan Usaha dan dana pihak ketiga Triwulan ke II Tahun 2024
- b. Dana Pihak ketiga (Tabungan Dan deposito)
- c. Perkembangan Aset Triwulan ke II Tahun 2024
- d. Perkembangan Laba Rugi Triwulan ke II 2024
- e. Tingkat Kesehatan Bank Juni 2024

3.	Tanggal Rapat	08 Oktober 2024
----	---------------	-----------------

	Jumlah Peserta	2 orang
--	----------------	---------

Topik/Materi Pembahasan:

- a. Perkembangan Usaha dan dana pihak ketiga Triwulan ke III Tahun 2024
- b. Dana Pihak ketiga (Tabungan Dan deposito)
- c. Perkembangan Aset Triwulan ke III Tahun 2024
- d. Perkembangan Laba Rugi Triwulan ke III 2024
- e. Tingkat Kesehatan Bank Juli 2024

4.	Tanggal Rapat	16 April 2024
----	---------------	---------------

	Jumlah Peserta	2 orang
--	----------------	---------

Topik/Materi Pembahasan:

- a. Perkembangan Usaha dan dana pihak ketiga Triwulan ke I Tahun 2024
- b. Dana Pihak ketiga (Tabungan Dan deposito)
- c. Perkembangan Aset Triwulan ke I Tahun 2024
- d. Perkembangan Laba Rugi Triwulan ke I 2024
- e. Tingkat Kesehatan Bank April 2024



Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 6 kali untuk memberikan dan mengevaluasi kebijakan strategi BPR dalam menjalankan usaha

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun

1.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Damri Siagian, S.E
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	4 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	1 kali hadir
2.	Nama Anggota Dewan Komisaris	Heri Yusmadi P Simanjuntak, S.E
	Frekuensi Kehadiran (Fisik)	2 kali hadir
	Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi)	0 kali hadir

komisaris sudah menjalankan rapat dewan komisaris melalui tatap muka.

15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus



1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	1 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	1 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus



1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

Total Fraud Pada Tahun Laporan	0 kasus
Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan	0 kasus
Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan	0 kasus
Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya	0 kasus
Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan	0 kasus

Belum adanya penyimpangan internal dikarenakan BPR Tahunan Ganda selalu menjaga baik transparansi si setiap aspeknya.

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

1.1. Permasalah Hukum yang Telah Selesai

Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0 kasus

1.2. Permasalah Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian

Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus
Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian	0 kasus



17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

BPR Tahunan Ganda tidak memiliki benturan kepentingan yang berakibat fatal bagi Bank

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

1.	Tanggal Pelaksanaan	01 Maret 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	SMK Yadika Natar
	Penjelasan Kegiatan	Hari ulang Tahun SMK Yadika Natar.
	Jumlah (Rp)	Rp300.000
2.	Tanggal Pelaksanaan	24 April 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Karang taruna
	Penjelasan Kegiatan	Pembangunan Mushola Nurul islam di Natar
	Jumlah (Rp)	Rp200.000
3.	Tanggal Pelaksanaan	05 Februari 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Karang Taruna
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan perbaikan dan penimbunan jalan
	Jumlah (Rp)	Rp100.000
4.	Tanggal Pelaksanaan	04 Juli 2025
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Karang taruna
	Penjelasan Kegiatan	Sumbangan pembangunan tugu pemuda kalirejo
	Jumlah (Rp)	Rp100.000
5.	Tanggal Pelaksanaan	02 Agustus 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial



	Penerima Dana	Perangkat Desa Natar
	Penjelasan Kegiatan	Partisipasi perayaan 17 agustus desa natar
	Jumlah (Rp)	Rp100.000
6.	Tanggal Pelaksanaan	07 Agustus 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Perangkat Desa Kalirejo
	Penjelasan Kegiatan	Partisipasi perayaan 17 agustus desa Kalirejo
	Jumlah (Rp)	Rp250.000
7.	Tanggal Pelaksanaan	14 Agustus 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Perangkat Desa Terbanggi Besar
	Penjelasan Kegiatan	Partisipasi perayaan 17 agustus desa Terbanggi Besar
	Jumlah (Rp)	Rp150.000
8.	Tanggal Pelaksanaan	16 Oktober 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Ponpes bustanul ulum sridadi
	Penjelasan Kegiatan	Bantuan acara hari santri nasional Ponpes bustanul ulum sridadi
	Jumlah (Rp)	Rp100.000
9.	Tanggal Pelaksanaan	10 Oktober 2024
	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	01. Kegiatan Sosial
	Penerima Dana	Panitia Natal Panca putra grup
	Penjelasan Kegiatan	Partisipasi acara Natal bersama PT Panca Putra Grup
	Jumlah (Rp)	Rp2.500.000

Semua kegiatan yang diberikan sumbangan berupa kegiatan sosial tidak ada kegiatan politik



Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi transparansi PT BPR TAHUAN GANDA untuk tahun 2024. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Natar, 12 Maret 2025

PT BPR TAHUAN GANDA

Disetujui

Mengetahui

Herikson Laju Siahaan, S.E
Direktur Utama

Damri Siagian, S.E
Komisaris Utama